

BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

Oleh : M. Nur Alamsyah

ABSTRAK

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakan sebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalam sirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakan iklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan oleh sebuah pengorganisasian.

Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh mekanisme politik yang berlangsung dan menunggunya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunan bagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentuk evaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalam suasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utama pembentukan negara.

Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalam mengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainya tujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerah yang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuai mekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalam mengimplementasikan rencana dan tujuan pembangunan daerah adalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakat daerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.

Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan

Birokrasi dan Tujuan Pelayanan

Manusia modern, menghabiskan hidupnya dalam organisasi. Organisasi menjadi pemimpin yang tanpa disadari menjadi lingkungan yang selama ini kita huni. Sangat tidak mengherankan jika manusia kemudian disebut dalam (Prethus,1962) sebagai *Organizational Society*. Dalam konteks kenegaraan, kehidupan pengorganisasian masyarakat dalam wilayah negara, pengorganisasiannya disebut birokrasi pemerintahan. Dalam era demokratisasi, dilema dalam hubungan antara penjabaran nilai-nilai demokrasi dan realitas manajemen organisasi birokrasi di masyarakat menjadi hal yang pelik, rumit serta problematik.

Pengelolaan pelayanan dan terciptanya pembangunan bagi masyarakat adalah tujuan yang hendak dicapai bagi masyarakat. Pelembagaan tersebut merupakan dasar diciptakannya birokrasi sebagai alat dalam mencapai tujuan yang hendak di capai. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk melakukan beberapa tugas utama akan keberadaan dari pemerintah yaitu:

1. Menjamin Keamanan Negara
2. Memelihara ketertiban
3. Menjamin perlakuan yang adil
4. Melakukan pekerjaan umum dan pelayanan masyarakat
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menerapkan kebijakan ekonomi

Mencermati beberapa tugas pemerintah tersebut diatas, tentunya menjadi tugas secara inklusif terhadap pemerintah termasuk pada level daerah utamanya provinsi. Target tersebut tentunya bukanlah hal yang sulit dicapai, karenanya sistematisasi kerja yang dilakukan melalui penciptaan perangkat Negara yang lebih dikenal dengan birokrasi atau state apparatus. Kondisi design sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih bersikukuh pada mekanisme patron klien yang sangat kuat. Hal tersebut meletakkan

posisi birokrasi pada posisi penting dan menentukan, sebab apapun model, design atau tujuan yang hendak dicapai akan secara mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Masyarakat Sulawesi Tengah dengan jumlah 2.349.998 adalah target tujuan pembangunan yang semestinya telah dapat terpolakan secara baik untuk capaian visi dan misi yang hendak dicapai jika dilihat dari dasar pembentukan pemerintahan daerah. Birokrasi adalah kelengkapan negara yang disiapkan untuk secara teknis dapat memberikan arahan, target dan capain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, birokrasi yang tidak memiliki hal tersebut tentunya mestinya dipertanyakan keberadaannya, sebab birokrasi ada karena ada masyarakat dengan pengertian birokrasi bukan hanya untuk birokrasi itu sendiri. Dua kondisi itu akan melahirkan justifikasi bahwa model pertama lebih kepada birokrasi demokratis dan yang kedua lebih kepada birokrasi otoritarian.

Birokrasi lokal Provinsi sebagai komponen pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah lebih kepada penguatan fungsi koordinasi dan dukungan teknis terhadap pemerintahan dibawahnya sekaligus upaya pengawasan. Sulawesi Tengah memiliki jumlah personil Birokrasi yang komposisi perbandingannya dengan jumlah penduduk adalah setiap satu aparatur Pemprov melayani 414 masyarakat, dari 10 daerah kabupaten kota yang ada diwilayah Sulteng. Kondisi tersebut, menjadikan tugas birokrasi provinsi harus dapat tercipta sebagai sebuah pola yang sistematis dan terarah untuk sesegera mungkin dapat berbentuk nyata. Dapat dibayangkan jika target capaian akhir tidak ditetapkan dalam bentuk indikator capaian dengan tingkat koordinasi yang maksimal maka penyelenggaraan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat sulit dicapai dan senantiasa hidup pada determinasi janji politik semata, dan hal itu merupakan kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya serta kegagalan pemimpin politik dalam mengarahkan dan membangun team work yang baik.

Realitas sosial masyarakat yang dilahirkan serba tidak teratur dan transisi, yang terdiri dari berbagai kelompok-kelompok majemuk, tampil dengan topeng liberal demokrasi yang serba coba-coba dan menuntut lahirnya sebuah citra *perfect* dari birokrasi yang berwujud demokratis dalam perspektifnya (kebutuhannya, baca) membutuhkan ruang kontrol untuk akselerasinya. birokrasi secara institusional kelembagaan tidak mengelola potensi masyarakat pada ruang-ruang yang bersifat apolitis, umumnya birokrasi melakukan pendekatan secara politik. Ini terjadi disebabkan penempatan birokrasi pada posisi puncak negosiasi dengan masyarakat bergeser sebagai pelaksana (leading sector) kebijakan politik pemerintah.

Degradasi Fungsi Birokrasi dalam Desentralisasi di Indonesia

Birokrasi yang ada pada negara yang menganut sistem demokrasi dengan heterogenitas yang tinggi memiliki ciri Pragmatis atau berorientasi pada visi, misi; Rule of the game atau menjalankan aktifitas sesuai koridor perundangan yang berlaku; sekuler atau tidak berorientasi kesukuan atau agama sehingga berprinsip plural. Dengan karakter tersebut menempatkan birokrasi sebagai organisasi yang profesional, akuntabel dan mandiri. Yang dirasakan saat ini, umumnya hubungan antara masyarakat dan birokrasi lebih didasarkan atas trust atau kepercayaan masyarakat atas kapasitas dan potensi birokrasi dalam mencapainya, hal ini adalah realitas budaya yang tercermin dalam prinsip patronage masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bagaimana keadaan pemerintah provinsi saat ini, jika dilihat dari kapasitas, potensi dan sistem yang dibangun? Kondisi tersebut penting dipahami untuk dapat memposisikan diri terhadap Mentalitas *state apparatus* Indonesia pada umumnya dan kekuatan komparatif dalam menggenjot wilayah Sulteng. Saat ini, jika mencermati arah puncak capaian visi dan misi yang dikehendaki oleh kebijakan politik pemerintah, maka kini belum menampakkan kongkretisasi

perwujudannya. Pengejawantahan nilai-nilai demokrasi sistem pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai kesejajaran yang digerakkan visi dan misi masih terbatas secara retorik dan bahkan menjadi *totem* bagi aparaturnya daerah.

Keterbatasan dan Kesulitan dalam mengakselerasi kerangka baru (aturan) dalam aktivitas tugasnya, karena aspek sumber daya manusia dan *rule driven* penggerakannya belum berubah secara total sehingga mentalitas lama yang ada pada setiap wajah aparaturnya daerah masih bergelayut dengan amannya. Kenyataan ini melahirkan banyaknya keragu-raguan dalam pengimplementasiannya sehingga kualitas birokrasi pun menjadi sangat rendah sebab belum digerakkan oleh visi tetapi lebih karena kebutuhan sosial ekonomi.

Fenomena sedemikianlah yang kini mendera pelembagaan aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas saat ini, disamping sangat rendahnya motivasi, kemauan kerja serta inisiatif aparat birokrasi, karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan tersebut secara jelas juga terlihat dalam sistem pengelolaan birokrasi di Sulawesi Tengah, baik di level kabupaten dan utamanya di tingkat Provinsi yang belum menunjukkan sistem kerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Lemahnya hal tersebut dapat terlihat dalam capaian target penyelenggaraan pemerintahan pada setiap leading sector atau SKPD yang terkait. Saat ini dapat dilihat progress report setiap SKPD lebih banyak kepada aktifitas administratif sehingga keberadaan status dinas, badan, kantor, biro menjadi nampak tidak jelas orientasi capaian terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Mencermati berbagai fenomena yang belakangan ini muncul di kota-kota yang ada di Sulawesi Tengah tentang problematika pelayanan publik (Pengaduan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, KTP, KK dll) yang kerap mengalami gugatan dari komunitas masyarakat yang selalu hangat di media massa lokal di daerah. Ini merupakan fenomena umum yang terjadi di Indonesia. Kondisi

tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survey dari PSKK UGM 2001, bahwa umumnya pelayanan publik di Indonesia adalah masih buruk.

Kemajuan daerah yang merangkak dengan sangat pelan jika melihat angka distribusi prosentase kegiatan ekonomi bagi umumnya di daerah-daerah di Sulteng yang didominasi kegiatan Pertanian dan Jasa, Semestinya menjadi penanda bahwa masyarakat telah terbiasa memahami esensi sebuah pelayanan, baik dari kegiatan jasa atau jenis lain seperti perdagangan. Sehingga sangat naif bagi pemerintah untuk tidak melihat potensi tersebut untuk dapat dikelola secara lebih optimal, sebab menjadi kekuatan pemerintah yang mesti dikembangkan, mengingat bahwa keterkaitan antara berbagai *Stoke Holder* dalam menciptakan pembangunan yang sinergis didaerah ini, menuntut keterlibatan berbagai komponen yaitu *Birokrasi, Civil Society Dan Privat Sector*.

Tabel 1. Data Birokrasi Pemprov Sulteng Berdasarkan Golongan

Tingkat Gol	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
	L	P	
Gol 1	80	36	116 (1,89)
Gol 2	1098	694	1792 (29,72)
Gol 3	2660	1221	3881 (63,39)
Gol 4	223	110	333 (5,44)
Total 2008	4061	2061	6122 (100)
Total 2006	3655	1919	5574

Sumber: BPS Sulteng, 2009

Dengan melihat pada tampilan data tahun 2009, Nampak bahwa dominasi kepangkatan yang secara teknis terkait dengan mesin kerja pada instansi pemerintah propinsi sangat didominasi oleh pegawai golongan III (tiga) dengan total 63,39% dari jumlah total pegawai.

Kemudian diikuti oleh pegawai golongan II (dua) dengan 29,72%. Jika berkaca kepada efektifitas dan efisiensi kerja kondisi kepegawaian tersebut sudah sangat ideal dilihat dari bekerjanya mesin produksi kerja kelembagaan. Tampilan data lain tentang keterkaitan kualitas kerja dengan stratifikasi pendidikan para pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Birokrasi Pemprov Sulteng Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	L	P		
SD	109	12	121	(1,98)
SLTP	88	31	119	(1,94)
SLTA	1931	1033	2964	(48,42)
Diploma	333	409	742	(12,12)
Sarjana	1218	711	1929	(31,51)
Magister	188	58	246	(4,02)
Doktor	1	0	1	(0,02)
Total 2008	3868	2254	6122	100%
Total 2007	3594	2055	5649	

Sumber: BPS Sulteng, 2009

Relevansi antara kedua data diatas, dimana pada tingkat pendidikan, maka pegawai pemprov Sulteng didominasi oleh pendidikan SLTA dengan 48,42% dan diikuti tingkat pendidikan Sarjana dengan 31,51 % dari total jumlah pegawai yang ada. Terjadinya stagnasi dan kondisi kerja yang lebih memilih lebih rutin daripada yang kreatif merupakan implikasi dari tantangan dan tingkat kompetensi kerja yang rendah meskipun ukuran data tersebut diatas secara kuantitatif merupakan ukuran profesionalitas kerja yang telah cukup memadai untuk pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan pada level seperti ini. Hal ini dimungkinkan karena prinsip the right man on the right job tidak menjadi kenyataan sehingga lebih cenderung apa adanya.

Penggunaan jasa pelayanan publik yang menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik di daerah adalah umumnya buruk. Hal tersebut menjadi kesimpulan umum dari berbagai penelitian yang telah dilakukan yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena pelayanan publik masih dilaksanakan dan digerakkan oleh peraturan (*rule driven*) serta anggaran, dan bukan oleh misi. Kendala pelayanan demikian secara prinsipil juga masih mendera aparat provinsi utamanya dengan tidak kukuhnya lagi wilayah kekuasaan pemprov dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan seperti dimasa orde baru.

Perwujudan Birokrasi Amanah

Konsep baru birokrasi saat ini, adalah merupakan bentuk birokrasi yang dapat mengedepankan aspek *good governance* dalam mekanisme kerjanya. Untuk itu penggunaan ilmu pengathuan dan teknologi sebagai perwujudan dari *modernizing birokrasi* secara mutlak merupakan keharusan yang tak dapat terbantahkan. Pada kondisi tersebut, maka keadaan birokrasi lokal Indonesia secara utuh telah mengadopsi dan familiar dengan hal tersebut sebab sesuai kebijakan dan kondisi yang ada sudah semestinya telah dikembangkan di Indonesia. Hal lain bahwa dalam mendukung perwujudan kegiatan tersebut secara utuh mengingat telah besarnya anggaran pelatihan, seminar, kursus, diklat untuk upaya peningkatan kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dari pusat hingga pelosok desa.

Tetapi mengapa belum berubah, yang mengalami perubahan adalah wajah teknis administratif yang kian rumit, sementara perilaku birokrasi sebagai *driven* utama tidak mengalami perubahan, tetap bersikukuh sebagai nahkoda atau penentu segala sesuatu. Paternalisme birokrasi, yaitu kondisi dimana bawahan selalu takut melampaui kemampuan pimpinan baik dari segi kapasitas teknis maupun wewenang pimpinan atau atasannya. Sehingga tidak berbeda

dengan perilaku birokrasi orde baru, dimana bawahan tergantung kepada pimpinan.

Kondisi itu, tidak melahirkan *diskresi* dalam birokrasi yaitu kebebasan menerjemahkan situasi yang dihadapi tiap aparat secara bertanggungjawab atas sesuatu profesi dan tugasnya dalam mengambil keputusan sendiri dan tidak bersandar pada juklak dan juknis yang kaku. Adanya ketergantungan, menyebabkan tidak jalannya mekanisme sistem pelayanan publik sebagai salah satu tugas aparat pemerintah sehingga menciptakan *inefisiensi birokrasi* dalam merespons kebutuhan pengguna jasa.

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai Daerah Kab/Kota se Sulteng

Daerah	Golongan				Jumlah
	1	2	3	4	
Banggai	172	2729	4069	1080	8050
poso	-	31	174	620	825
Donggala	210	3335	5664	462	9671
Buol	53	1035	712	91	1891
Parigi Moutong	173	2277	3141	520	6111
Tojo Una Una	53	1485	1385	386	3309
Palu	*	*	*	*	8096

Sumber: BPS Sulteng, 2009

Catatan: * Data Palu tidak utuh, Kab. Banggai Kepulauan, Morowali, dan Toli-Toli tidak tersedia

Data diatas menunjukkan bahwa pada birokrasi jika dilihat berdasarkan Golongan untuk pegawai di daerah-daerah se Sulteng, kondisinya sama dengan fenomena kepegawaian di tingkat Propinsi yang berada umumnya pada golongan 3 (tiga) dan 2 (dua) kemudian pada level pendidikan Nampak pada realitas propinsi juga terdapat pada kondisi pendidikan pegawai di level; kab/Kota yaitu tingkat SMU dan Sarjana yang mendominasi potensi dan kecendrungan kualitas kerja birokrasi dan kemudian adanya angka yang cukup besar pada program sarjana yang nota bene akan membangun kekuatan penyeimbang dalam kehidupan birokrasi yang relatif

teknis. Dampaknya adalah akan terjadi banyak job yang akan mengalami kondisi konflik yang cukup pelik dikarenakan benturan pekerjaan teknis yang didasarkan atas jenjang pendidikan dan bukan pada kecakapan kerja sebagaimana yang diinginkan oleh aktifitas birokrasi.

Mengapa masyarakat tidak melakukan sebuah *Komplain* atau *counter attack* atas fenomena yang merugikan ini, tak lain sebagai sikap/prinsip *patronage* yang tabu untuk komplain atas sebuah kepemimpinan di masyarakat utamanya budaya pemerintahan yang *bireucratic totalitarian* di era orde baru. Hal tersebut menciptakan kondisi empiris yang melahirkan *Inefisiensi birokrasi* yang merupakan penyakit birokrasi yang teramat sulit diselesaikan. Penyebab sulitnya melaksanakan fungsi pelayanan dan pengembangan daerah di sulteng selain karena luasnya wilayah kerja yang mencakup karena beberapa hal;

1. Pertumbuhan penduduk
2. Inflasi
3. Meningkatnya harapan akan kualitas pelayanan
4. Sumber pendapatan daerah yang tidak memadai rentangnya dengan kebutuhan
5. Secara ril nilai pendapatan semakin turun
6. Kuatnya kontrol pusat terhadap upaya mencari sumber-sumber pendapatan lain
7. Ketidak seimbangan antara fungsi pemerintah daerah dan sumber dana.

Dari 7 (tujuh) hal diatas pada prinsipnya hanya satu yang senantiasa menjadi problem utama, yaitu keterbatasan dana daerah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pelayanan publik.

Sebenarnya terdapat berbagai upaya dan alternative yang dapat dipilih untuk menutupi keterbatasan tersebut dengan melalui berbagai cara dengan:

1. Menghapuskan pengeluaran yang tidak urgen
2. Mencari alternative biaya efektif dalam pelayanan jasa
3. Memprivatisasi unit kegiatan tertentu

4. Menjual aktiva yang berlebihan
5. Mengefektifkan retribusi dan pendapatan dari pajak dan kebocoran
6. Menaikkan tarif pajak
7. Menggalang partisipasi masyarakat
8. Mengidentifikasi jenis pajak baru
9. Bagi hasil pajak
10. Pinjaman dari pihak ketiga bagi usaha-usaha daerah yang produktif secara profesional.

Selain inefisiensi diatas, banyak kegiatan pemerintah bukan didorong untuk menciptakan program produktif untuk mendukung sistem pemerintahan mandiri dalam keuangan, dimana dalam konsep *reinventing government* yang dijadikan sebagai pola umum acuan kehidupan otonomi daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik (*good governance*) tidak diimplementasikan. Akibatnya tercipta inefisiensi anggaran, penyebabnya karena daerah dibebani biaya non-produktif dari program ideologis masa lalu ataupun baru sebagai refleksi penciptaan identitas diri daerah.

Kebijakan investasi, lebih sebagai simbolisasi '*penanda*' daerah dalam lokus 'status' atau 'gengsi' dan tidak dalam konteks mekanisme ekonomi bisnis melainkan sebatas perwujudan kebijakan pusat yang harus diimplementasikan birokrat daerah sehingga berkesan menangkap perubahan yang dikehendaki oleh pusing elit negara melalui kebijakan yang terdesentralisasi. Fenomena 'miris' dari mekanisme birokrasi daerah saat ini adalah mekanisme menciptakan unit bisnis 'plat merah' yang menjadi kompetitor pelaku usaha masyarakat yang memiliki modal terbatas. Untuk mengeksekusi pengakuan suatu daerah seperti wilayah pesisir, yang dikembangkan secara "*instan*" adalah, aspek terkait laut seperti perikanan dll tanpa perhitungan aspek keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial, SDM, manajemen dll.

Kebijakan ini masih dipertahankan dan diciptakan, karena pola *latah* birokrasi di Indonesia. Realisasi investasi yang diemban oleh

sebagian komponen aparatur pemerintah daerah hanya dilihraat sebagai usaha in efisiensi yang menghabiskan anggaran daerah sehingga dapat terlihat bahwa alokasi anggaran untuk instansi teknis terkait investasi sangat kecil dan lebih memfokuskan pada aktifitas rutin pemerintah yang sesungguhnya memiliki korelasi yang kurang berkorelasi dengan upaya peningkatan pelayanan maupun pembangunan.

Kegiatan pelayanan publik mestinya telah dapat disesuaikan dengan *Local Good Governance Index (LGGI)* yang digunakan saat ini dalam pengukuran kinerja sistem pemerintahan daerah sebagai wujud efektifitas dan efisiensi, terutama untuk anggaran daerah yang akuntabel. Masyarakat mendapat respons Advokasi nilai atas pelayanan yang diterimanya dari kelompok-kelompok intelektual yang dipengaruhi lingkungan pendidikan, NGO, civil society yang menjadi agent demokrasi liberal dalam masyarakat. Dilema yang ditimbulkan adalah keinginan mengimplementasikan paradigma pelayanan secara total atas masyarakat sesuai tuntutan demokratisasi. Sementara birokrasi diperhadapkan kepada keterbatasan supra dan infra struktur seperti yang digambarkan diatas. Keadaan ini melahirkan budaya transisi dari birokrasi Indonesia.

Birokrasi kekinian (Warsito Utomo,1996) mestinya bertumpu pada *ACE (Alignment, Creativity And Empowerment)* atau struktural, berdaya cipta dan pemberdayaan sehingga komponen dalam struktur dan sistem birokrasi serta masyarakatpun harus berubah untuk dapat berakselerasi secara cepat sehingga tidak lagi mengedepankan kepada egosentrisme lokalistik yang didasarkan pada arogansi baik dari tataran sosial maupun material. Yaitu masih kentalnya masyarakat Indonesia utamanya kalangan tertentu, yang terbiasa dengan kemudahan sehingga melupakan aspek komunitarian yang menjadi tanggung jawab pengelolaan organisasi pelayanan publik.

Penting diketahui bahwa prinsip pengelolaan manajemen pelayanan demokratis oleh Giddens dalam *Third Way* dikatakan “*tidak ada hak tanpa kewajiban*”. Untuk itu dibutuhkan sebuah tataran teoritik yang diharapkan dapat menghasilkan kesadaran 5 F yaitu *fast, focus, flexible, friendly and fund atau cepat, terfokus, fleksibel, bersahabat dan pembiayaan jelas*. Pada kondisi *learning organization* seperti inilah birokrasi merupakan sebuah institusi yang memberdayakan masyarakat.

Kehadiran birokrasi mestinya bukanlah merupakan representasi negara yang hadir secara rutin melainkan hadir sebagai kebutuhan akan kondisi masyarakat dan tantangan yang mengitarinya. Refleksi birokrasi yang hanya mampu menyelesaikan kegiatan rutin yang disusun berdasarkan anggaran atau DIPA semata, sesungguhnya merupakan *design inkrementalisme* birokrasi yang kerap hadir pada sosok wajah birokrasi lokal hingga hari ini termasuk di Sulawesi tengah. Bahkan kondisi terburuk yang terjadi adalah ketidakmampuan birokrasi daerah dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk anggaran SKPD tertentu sehingga harus dikembalikan ke kas negara.

Akselerasi birokrasi yang lambat terkadang menjadikan birokrasi lebih menjadi beban bagi pembangunan daerah ketimbang menjadi pendorong sebagaimana yang dikemukakan diatas. Kenyataan akan hal tersebut terlihat dengan sangat dominanya biaya belanja pegawai secara rutin daripada biaya yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan public. Kualitas pegawai dengan skill yang rendah turut menjadikan birokrasi lokal larut dengan *euphoria* lama *patronage* birokrasi yang sangat identik dengan kondisi KKN yang kerap hadir dalam ruang hening birokrasi sacral yang menjauhkan diri dari masyarakat.

PENUTUP

Birokrasi Pemerintah di Sulawesi tengah saat ini adalah sebuah sistem yang mengkonstruksi diri dalam *patronage* birokrasi yang belum digerakkan oleh misi tetapi masih digerakkan oleh kebiasaan atau berorientasi pada rutinitas yang sesungguhnya masih kelanjutan masa lalu. Prinsip birokrasi yang tidak berubah dalam konteks ilmiah adalah birokrasi yang totalitarian, sebab birokrasi sesuai peruntukannya adalah mengelola masyarakat. Kebutuhan masa depan bukanlah sesuatu yang sesuai apa yang dibutuhkan hari ini.

Model struktural, yang masih kental dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerap dimaknai secara negatif sehingga dibutuhkan perubahan iklim dan sistem yang lebih kondusif sesuai karakter dan kebutuhan masyarakat. Penting untuk diingatkan kembali bahwa membangun sulteng tidaklah cukup dengan adanya birokrasi, tetapi yang dibutuhkan adalah birokrasi daerah yang dapat menjadi motivator pembangunan daerah yang konstruktif yang mampu berakselerasi dengan kebutuhan masyarakat secara cerdas.

DAFTAR PUSTAKA :

- A.Makmur Makka (ed),2006, Reformasi Birokrasi,The Habibie Centre, Jakarta
 Ryass Rasyid, 1995, Konsep Dasar Kepemimpinan Pemerintahan, Yayasan Karya Dharma , IIP, Jakarta.
 Sedarmayanti, ,2007 Bag. Ketiga; *Good Governance Dan Good Corporate*, Mandar Maju, Bandung.
 Joko Widodo, , 2006, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayu Media, Malang
 David Osborne & Ted Gaebler, 1997, *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
 Mustopadidjaja AR., (*Tanpa Tahun*), (Makalah) *Beberapa Dimensi Dan Dinamika Kepemimpinan Abad 21*.
 Kooiman, J. (ed), 1993, *Modern Governance: New Government-Society Interactions*, Sage Publications, London.
 Mas' oed, Muhtar, Ph.D. 1994. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
 M. Nur Alamsyah, 2006.*Strategi Manajemen Pemerintahan Menuju Pelayanan Publik*, Jurnal Akademika, Untad Press, 2006